



Nepotisme “Kesenjangan Sosial dalam Akses Bantuan Bencana: Analisis Sosiologis tentang Distribusi Bantuan di Kelurahan Parombunan Kota Sibolga”

Niat Jeserlin Gea¹, Ferial Amelia Sembiring², Rina Kesia Silaban³, Sudirman Lase⁴, Wensdy Sitindaon⁵

¹Mahasiswa, Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Kristen, IAKN Tarutung

^{2,3,4,5}Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, IAKN Tarutung

*correspondence: jeserlingea375@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme kesenjangan sosial dan indikasi praktik nepotisme dalam distribusi bantuan bencana serta implikasinya terhadap keadilan dan hubungan sosial masyarakat di Kelurahan Parombunan, Kota Sibolga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan BPBD Kota Sibolga, pemerintah kelurahan, Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat, serta warga terdampak yang menerima maupun tidak menerima bantuan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme distribusi bantuan secara formal telah memiliki prosedur administratif, tetapi terdapat kerentanan pada tahap pendataan awal akibat tingginya diskresi aparat lokal, keterbatasan transparansi, dan belum meratanya verifikasi terhadap warga terdampak. Kedekatan personal, hubungan kekerabatan, dan jaringan kekuasaan lokal terindikasi memengaruhi akses terhadap informasi, pendataan, dan verifikasi calon penerima. Kondisi tersebut menghasilkan ketidakadilan distributif dan prosedural serta menempatkan masyarakat tanpa jaringan sosial pada posisi yang lebih rentan. Ketimpangan distribusi juga berdampak pada kecemburuan sosial, kecurigaan antartetangga, pelemahan solidaritas, dan menurunnya kepercayaan terhadap birokrasi lokal. Penelitian menegaskan bahwa distribusi bantuan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan arena interaksi antara birokrasi, stratifikasi sosial, dan jaringan kekuasaan. Transparansi data, verifikasi partisipatif, mekanisme sanggah, kanal pengaduan, dan pengawasan independen diperlukan untuk mewujudkan tata kelola bantuan bencana yang lebih adil dan akuntabel.

Kata Kunci: bantuan bencana, nepotisme, kesenjangan sosial, keadilan distributif, birokrasi, stratifikasi sosial.

PENDAHULUAN

Bencana tidak pernah semata-mata merupakan peristiwa alam, tetapi juga fenomena sosial yang dapat mengungkap sekaligus memperbesar kerentanan dan ketimpangan yang telah ada dalam masyarakat. Dampak bencana sangat dipengaruhi oleh posisi sosial, kemampuan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan jaringan yang dimiliki kelompok terdampak. Wisner et al. (2004) menegaskan bahwa risiko bencana terbentuk melalui interaksi antara bahaya dan kerentanan sosial sehingga kelompok dengan sumber daya terbatas cenderung menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Dalam konteks Indonesia, Pramono (2016) juga menunjukkan bahwa penanggulangan bencana perlu dipahami melalui perspektif sosiologis karena struktur sosial, relasi kekuasaan, dan kapasitas masyarakat menentukan kemampuan menghadapi serta memulihkan diri dari bencana. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi bantuan menjadi salah satu aspek fundamental dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.

Bantuan bencana secara normatif ditujukan kepada masyarakat berdasarkan tingkat kerusakan, kebutuhan, dan kerentanan. Namun, distribusi bantuan tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral. Penelitian di berbagai konteks menunjukkan bahwa relasi politik, etnisitas, jaringan sosial, dan posisi sosial dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan. De Silva (2009), misalnya, menemukan bahwa distribusi bantuan pascatsunami dapat dipengaruhi oleh politik, etnisitas, dan struktur ketimpangan yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, Abidin dan Handayani (2022) menunjukkan adanya hubungan antara stratifikasi sosial dan akses terhadap keselamatan dalam situasi bencana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bantuan yang seharusnya menjadi instrumen pemulihan justru dapat menjadi arena reproduksi ketimpangan ketika proses pendataan dan penyalurannya dipengaruhi oleh relasi sosial yang tidak setara. Persoalan tersebut menjadi relevan di Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, wilayah yang dalam penelitian ini digambarkan memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Data penelitian menunjukkan adanya persoalan ketimpangan akses terhadap bantuan pascabencana. Kelompok yang memiliki kedekatan sosial dan jaringan dengan aparat lokal dipersepsikan memperoleh akses informasi dan verifikasi yang lebih mudah, sedangkan sebagian masyarakat yang terdampak tetapi tidak mempunyai jaringan serupa mengalami hambatan dalam proses pendataan. Fenomena tersebut mengarahkan perhatian pada praktik nepotisme, yakni preferensi yang didasarkan pada hubungan keluarga, kedekatan personal, atau jaringan tertentu daripada kriteria objektif penerima.

Secara sosiologis, fenomena tersebut dapat dibaca melalui teori stratifikasi Max Weber. Weber (1978) menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kelas ekonomi, tetapi juga oleh status dan kekuasaan (*party*). Ketiga dimensi tersebut memengaruhi peluang individu atau kelompok dalam memperoleh sumber daya. Dalam distribusi bantuan bencana, warga yang memiliki kedekatan dengan aktor lokal dapat mempunyai *life chances* yang berbeda dibandingkan warga yang tidak memiliki jaringan serupa. Perspektif ini diperkuat oleh konsep modal sosial Bourdieu (1986), yang menunjukkan bahwa jaringan dan hubungan sosial dapat dikonversi menjadi

sumber daya yang memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Persoalannya muncul ketika modal sosial privat digunakan untuk menentukan akses terhadap sumber daya publik yang seharusnya dialokasikan berdasarkan kebutuhan.

Fenomena nepotisme juga berkaitan dengan persoalan tata kelola birokrasi. Dalam konsepsi Weberian, otoritas legal-rasional memperoleh legitimasi melalui aturan formal, pembagian kewenangan, profesionalitas, dan penerapan prosedur yang impersonal (Weber, 1978). Karena itu, pendataan penerima bantuan idealnya ditentukan oleh kriteria kerusakan dan kerentanan, bukan kedekatan dengan aparat. Naskah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme formal sebenarnya telah melibatkan BPBD, kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan serta verifikasi tingkat kerusakan. Namun, persoalan ditemukan pada pendataan awal di tingkat lapangan, ketika pengumpulan nama sangat bergantung pada laporan Kepala Lingkungan, tidak semua rumah terdiverifikasi secara langsung, dan daftar penerima tidak disosialisasikan secara terbuka. Dengan demikian, kesenjangan dapat muncul bukan karena tidak adanya prosedur, tetapi karena terdapat jarak antara aturan formal dan praktik implementasi.

Ketidakadilan dalam distribusi bantuan memiliki konsekuensi yang melampaui kerugian material. Tyler (1988) menekankan pentingnya *procedural justice*, yakni penilaian masyarakat terhadap keadilan prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketika warga tidak memperoleh informasi mengenai kriteria penerima, tidak memiliki kesempatan untuk mengoreksi data, atau melihat perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang relatif sama, legitimasi proses dapat dipertanyakan. Penelitian di Parombunan menunjukkan bahwa kondisi tersebut berhubungan dengan munculnya kecemburuan sosial, saling curiga antartetangga, serta menurunnya kepercayaan terhadap birokrasi lokal. Dalam masyarakat pascabencana, keadaan ini menjadi persoalan serius karena pemulihan justru membutuhkan kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama sosial. Eadie dan Su (2018) menunjukkan bahwa modal sosial, kepercayaan, dan persepsi mengenai keadilan mempunyai peranan penting dalam pemulihan komunitas setelah bencana. Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara stratifikasi sosial dan bencana (Abidin & Handayani, 2022), modal sosial dalam pemulihan pascabencana (Agung et al., 2022; Eadie & Su, 2018), distribusi bantuan dan konflik sosial (Schwarz, 2013), serta ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (Nunung et al., 2025). Studi tentang nepotisme juga menunjukkan bagaimana hubungan personal dan jaringan kekuasaan dapat memengaruhi tata kelola pada tingkat lokal (Kaffah et al., 2023). Meskipun demikian, masih diperlukan kajian yang secara khusus menghubungkan nepotisme, stratifikasi sosial, diskresi birokrasi tingkat lokal, keadilan distribusi, dan kepercayaan publik dalam distribusi bantuan pascabencana. Di sinilah penelitian ini menempatkan kontribusinya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kesenjangan sosial dan indikasi praktik nepotisme dalam distribusi bantuan bencana serta mengkaji implikasinya terhadap keadilan distribusi dan hubungan sosial masyarakat di Kelurahan Parombunan, Kota Sibolga. Tujuan tersebut konsisten dengan fokus penelitian asli. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan distribusi bantuan sebagai arena interaksi antara birokrasi formal, diskresi lokal, modal sosial, dan stratifikasi kekuasaan. Dengan perspektif tersebut, ketidakmerataan bantuan tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif atau kesalahan pendataan, tetapi sebagai proses sosial yang

berpotensi mereproduksi ketimpangan, mengubah relasi antarwarga, serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis diimplementasikan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam mekanisme kesenjangan sosial dan indikasi praktik nepotisme dalam distribusi bantuan bencana di Kelurahan Parombunan, Kota Sibolga. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, relasi sosial, dan praktik yang berlangsung dalam proses pendataan serta distribusi bantuan, bukan pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menginterpretasikan fenomena berdasarkan perspektif aktor yang terlibat secara langsung (Safarudin et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Lokasi ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang rentan terhadap bencana serta adanya indikasi ketimpangan distribusi bantuan berdasarkan pengamatan awal. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi pejabat BPBD Kota Sibolga, Lurah Parombunan, Kepala Lingkungan (Kepling), tokoh masyarakat, serta warga terdampak bencana, baik yang menerima maupun tidak menerima bantuan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kelurahan, laporan BPBD, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan distribusi bantuan, kesenjangan sosial, dan kebencanaan.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dengan dukungan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan perangkat dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk menggali proses pendataan penerima bantuan, kriteria penentuan penerima, keterbukaan informasi, peran aparat lokal, pengalaman warga dalam memperoleh bantuan, serta persepsi informan mengenai keadilan distribusi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan distribusi bantuan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari para informan. Temuan diinterpretasikan menggunakan perspektif stratifikasi sosial dan otoritas legal-rasional Max Weber untuk menjelaskan bagaimana status, jaringan kekuasaan, serta penyimpangan dari prinsip birokrasi impersonal dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya bantuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses bantuan bencana di Kelurahan Parombunan tidak terutama disebabkan oleh ketiadaan prosedur formal. Secara administratif, mekanisme pendataan telah melibatkan BPBD Kota Sibolga, kecamatan, kelurahan, hingga Kepala Lingkungan (Kepling), disertai verifikasi tingkat kerusakan rumah oleh tim teknis. Persoalan justru muncul pada tahap pendataan awal, ketika diskresi aparat tingkat lingkungan, keterbatasan transparansi, dan relasi personal

berpotensi memengaruhi siapa yang masuk ke dalam daftar calon penerima. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal (*formal rules*) dan praktik implementasi (*rules in practice*).

Secara normatif, distribusi bantuan menggunakan kategori kerusakan rumah, ringan, sedang, dan berat, yang diverifikasi oleh tim gabungan teknis. Mekanisme tersebut mencerminkan prinsip birokrasi legal-rasional Weber, yakni keputusan administratif seharusnya didasarkan pada aturan, kompetensi, prosedur, dan pertimbangan impersonal. Namun, penelitian menemukan bahwa tidak semua rumah terdampak didatangi atau diverifikasi secara langsung pada tahap awal. Selain itu, daftar penerima dan kriteria kelayakan tidak disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan distribusi bantuan tidak harus muncul pada tahap pencairan atau penyerahan bantuan. Ketimpangan dapat terbentuk jauh sebelumnya melalui proses produksi data penerima. Ketika data awal sangat bergantung pada laporan seorang aktor lokal, diskresi administratif menjadi besar. Diskresi sebenarnya tidak selalu negatif karena aparat lokal memiliki pengetahuan mengenai kondisi warga. Namun, ketika diskresi tidak disertai verifikasi berlapis, transparansi, dan mekanisme koreksi publik, ruang bagi subjektivitas menjadi semakin terbuka. Dalam perspektif Weber (1978), birokrasi legal-rasional memperoleh legitimasi karena keputusan tidak didasarkan pada siapa seseorang, tetapi pada aturan yang berlaku terhadap setiap orang. Temuan Parombunan memperlihatkan situasi sebaliknya: prosedur formal tetap tersedia, tetapi pelaksanaannya pada tingkat lokal berpotensi dipengaruhi hubungan sosial. Dengan demikian, problem utamanya dapat dirumuskan sebagai distorsi implementasi birokrasi, bukan ketiadaan birokrasi.

Kedekatan Personal, Kekerabatan, dan Indikasi Nepotisme

Hasil penelitian mengidentifikasi adanya pengaruh kedekatan emosional, hubungan kekerabatan, dan loyalitas politik lokal pada tahap pengusulan calon penerima. Warga yang mempunyai relasi patron-klien dengan Kepling atau elite lokal digambarkan lebih mudah memperoleh informasi dan proses verifikasi, sementara warga yang tidak mempunyai jaringan kekuasaan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam konteks artikel ilmiah, temuan tersebut perlu dibahas secara hati-hati. Istilah nepotisme tidak cukup digunakan hanya karena penerima bantuan mengenal aparat. Yang menjadikannya problematik adalah ketika hubungan personal atau kekerabatan berfungsi sebagai kriteria informal yang menggantikan atau mengalahkan kriteria objektif kebutuhan dan tingkat kerusakan. Berdasarkan data penelitian, indikasi inilah yang ditemukan pada proses pengusulan penerima. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial Bourdieu (1986). Jaringan sosial merupakan sumber daya yang dapat memberikan keuntungan kepada individu. Dalam kehidupan sehari-hari, modal sosial dapat bersifat positif karena menghasilkan kepercayaan, pertolongan, dan solidaritas. Persoalan muncul ketika modal sosial privat dikonversi menjadi akses istimewa terhadap sumber daya publik. Pada titik itu, jaringan tidak lagi sekadar membantu seseorang memperoleh informasi, tetapi berpotensi menentukan kesempatan memperoleh bantuan yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan.

Reproduksi Stratifikasi Sosial dalam Akses Bantuan

Perspektif stratifikasi sosial Weber membantu menjelaskan mengapa akses bantuan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Weber (1978) membedakan distribusi kekuasaan melalui kelas (*class*), status (*status group*), dan kekuasaan/partai (*party*). Dalam kasus Parombunan, penelitian menunjukkan bahwa posisi warga dalam jaringan kekuasaan lokal dapat menghasilkan kesempatan yang berbeda untuk memperoleh sumber daya bantuan. Temuan ini menarik karena bantuan bencana pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan. Namun, apabila akses terhadap bantuan dipengaruhi oleh status dan jaringan kekuasaan, instrumen pemulihan justru dapat mereproduksi ketimpangan yang telah ada sebelumnya. Warga miskin yang tidak mempunyai jaringan menghadapi apa yang oleh naskah disebut “marginalisasi ganda” (*double marginalization*): pertama, mereka mengalami kerugian akibat bencana; kedua, mereka berisiko tereksklusi dari sumber daya pemulihan. Temuan tersebut konsisten dengan Abidin dan Handayani (2022), yang menunjukkan keterkaitan antara stratifikasi sosial dan akses terhadap keselamatan dalam situasi bencana. De Silva (2009) juga memperlihatkan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan dapat berinteraksi dengan struktur politik, etnisitas, dan ketimpangan sosial yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, bencana tidak selalu menghapus perbedaan sosial karena seluruh warga sama-sama menjadi korban. Sebaliknya, kondisi darurat dapat memperjelas siapa yang mempunyai akses terhadap informasi, pengambil keputusan, dan sumber daya.

Ketidakadilan Distributif: Ketika Kebutuhan Tidak Menentukan Alokasi

Implikasi pertama adalah persoalan keadilan distributif. Penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara tingkat kerusakan dan penerimaan bantuan: terdapat warga dengan kerusakan setara atau lebih berat yang tidak memperoleh bantuan, sementara warga dengan kerusakan relatif lebih ringan tetapi memiliki kedekatan dengan aparat dilaporkan menerima bantuan. Dalam situasi bencana, prinsip keadilan tidak harus berarti setiap orang menerima jumlah bantuan yang identik. Keadilan justru menuntut bantuan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, kerusakan, dan kerentanan. Karena itu, ketimpangan menjadi problematis ketika perbedaan bantuan tidak dapat dijelaskan oleh kriteria kebutuhan yang transparan. Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana. Ariany et al. (2023) menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam pemenuhan hak korban bencana. Dalam konteks Parombunan, persoalannya bukan hanya siapa menerima bantuan, tetapi apakah keputusan tersebut dapat dijelaskan dengan kriteria yang konsisten dan dapat diperiksa masyarakat.

Ketidakadilan Prosedural: Transparansi dan Hak untuk Mengoreksi Data

Dimensi kedua adalah keadilan prosedural. Penelitian menemukan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai daftar penerima dan mekanisme sanggah atau konfirmasi data. Akibatnya, warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi tidak terdata tidak mempunyai saluran yang jelas untuk mempertanyakan atau memperbaiki keputusan tersebut. Tyler (1988) menunjukkan bahwa penerimaan

masyarakat terhadap keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil yang mereka peroleh, tetapi juga oleh persepsi bahwa prosedur pengambilan keputusan berlangsung adil. Dalam konteks distribusi bantuan, transparansi menjadi sangat penting karena warga perlu mengetahui siapa yang berhak, berdasarkan kriteria apa, siapa yang melakukan verifikasi, dan bagaimana kesalahan data dapat dikoreksi. Karena itu, publikasi daftar sementara penerima bukan semata-mata persoalan administratif. Ia dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan validasi komunitas. Warga mengetahui kondisi tetangganya dan dapat memberikan koreksi apabila terdapat keluarga terdampak yang terlewat. Sistem demikian dapat mengurangi ketergantungan pada satu aktor lokal sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses pendataan.

Nepotisme dan Kerusakan Modal Sosial Pascabencana

Dampak sosial yang ditemukan tidak berhenti pada ketidakmerataan bantuan. Penelitian mengidentifikasi tiga konsekuensi: kecemburuan sosial dan retaknya solidaritas horizontal, erosi kepercayaan terhadap birokrasi lokal, serta keterasingan kelompok rentan. Pertama, ketidakadilan memunculkan friksi antartetangga. Warga dapat mengalihkan kekecewaan terhadap proses distribusi kepada warga lain yang menerima bantuan. Situasi ini berbahaya karena masyarakat pascabencana justru membutuhkan kerja sama dan gotong royong untuk memulihkan kehidupan bersama. Agung et al. (2022) menunjukkan pentingnya modal sosial dalam mengatasi konflik pascabencana, sementara Eadie dan Su (2018) menekankan hubungan antara kepercayaan, keadilan, dan modal sosial dalam proses pemulihan komunitas.

Erosi Kepercayaan terhadap Pemerintah Lokal

Dampak kedua adalah menurunnya kepercayaan terhadap birokrasi. Naskah penelitian mencatat bahwa sebagian warga tidak lagi memandang birokrasi lokal sebagai institusi yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai struktur yang dinilai lebih responsif terhadap kelompok tertentu. Erosi kepercayaan ini mempunyai konsekuensi jangka panjang. Pemerintah membutuhkan kepercayaan masyarakat bukan hanya ketika menyalurkan bantuan, tetapi juga ketika memberikan peringatan bencana, melakukan evakuasi, relokasi, pendataan, dan program mitigasi berikutnya. Apabila pengalaman ketidakadilan menghasilkan persepsi bahwa pemerintah tidak bekerja secara netral, warga dapat menjadi kurang kooperatif terhadap kebijakan kebencanaan di masa mendatang. Dari perspektif Weber, masalah tersebut berhubungan dengan legitimasi birokrasi. Otoritas legal-rasional dapat dipertahankan apabila masyarakat melihat bahwa aturan diterapkan secara konsisten. Ketika keputusan dipersepsikan bergantung pada kedekatan personal, legitimasi impersonal birokrasi melemah dan digantikan oleh logika patronase.

Dampak ketiga yang ditemukan adalah kecenderungan kelompok miskin yang tidak memiliki jaringan mengalami keterasingan dan rendahnya daya tawar terhadap kekuasaan lokal. Naskah menggambarkan sebagai kecenderungan menuju apatisme dan kepasrahan struktural. Temuan ini perlu diperhatikan karena ketimpangan bantuan dapat menciptakan lingkaran yang mereproduksi dirinya sendiri. Warga yang tidak memiliki akses jaringan gagal memperoleh bantuan; pengalaman tersebut memperkuat

keyakinan bahwa mereka tidak mempunyai daya untuk memengaruhi keputusan; akibatnya, partisipasi dalam proses pengawasan dan pengaduan semakin rendah. Rendahnya partisipasi kemudian memperbesar ruang bagi pengambilan keputusan yang tidak transparan. Karena itu, mekanisme pengaduan bukan sekadar sarana menerima keluhan, tetapi instrumen untuk mengembalikan agency warga dalam proses kebijakan publik.

Dari Diskresi Lokal menuju Tata Kelola Bantuan Partisipatif

Temuan penelitian mengarah pada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada model pendataan yang bertumpu pada satu jalur administratif. Naskah merekomendasikan verifikasi data berbasis partisipasi masyarakat (*community-based data verification*), publikasi daftar penerima, pembentukan pengawasan independen, serta penyediaan kanal pengaduan. Model tersebut merupakan pengembangan analitis berdasarkan masalah yang ditemukan dalam naskah, bukan mekanisme yang telah diuji dalam penelitian. Keunggulannya adalah memasukkan transparansi dan partisipasi masyarakat di antara proses pendataan dan penetapan penerima sehingga diskresi aparat lokal tetap dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan lapangan, tetapi tidak menjadi satu-satunya penentu.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa distribusi bantuan bencana bukan sekadar persoalan teknis-logistik. Di dalamnya terdapat proses distribusi kekuasaan, kesempatan, dan sumber daya. Prosedur formal dapat dirancang secara objektif, tetapi ketika memasuki struktur sosial lokal, implementasinya berinteraksi dengan hubungan kekerabatan, kedekatan personal, status, dan jaringan kekuasaan. Kontribusi utama penelitian terletak pada temuan bahwa nepotisme dalam distribusi bantuan tidak harus muncul sebagai pelanggaran prosedur yang kasatmata, tetapi dapat bekerja melalui tahap yang lebih awal dan kurang terlihat, yakni siapa yang didata, siapa yang memperoleh informasi, siapa yang segera diverifikasi, dan siapa yang memiliki kesempatan untuk mengoreksi data. Hal ini menjelaskan mengapa prosedur administratif yang tampak formal belum otomatis menghasilkan distribusi yang adil. Dengan demikian, perspektif Weber membantu memperlihatkan bahwa persoalan Parombunan merupakan pertemuan antara stratifikasi sosial dan distorsi otoritas legal-rasional. Jaringan kekuasaan informal dapat mengubah *life chances* warga dalam memperoleh sumber daya publik, sedangkan lemahnya transparansi memungkinkan hubungan personal memasuki keputusan birokratis. Hasil penelitian karena itu menegaskan bahwa keadilan bantuan pascabencana membutuhkan lebih dari sekadar ketepatan jumlah bantuan; ia membutuhkan data yang dapat diverifikasi, prosedur yang transparan, kesempatan yang setara untuk didengar, mekanisme sanggah, dan pengawasan partisipatif. Tanpa elemen-elemen tersebut, bantuan yang seharusnya memperkuat pemulihan berpotensi justru mereproduksi kesenjangan sosial yang telah ada sebelumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan bencana di Kelurahan Parombunan, Kota Sibolga, secara formal telah mengikuti mekanisme administratif yang melibatkan

BPBD, kecamatan, kelurahan, dan Kepala Lingkungan. Namun, persoalan muncul pada tahap implementasi, terutama dalam proses pendataan awal calon penerima. Ketergantungan yang besar terhadap diskresi aparat lingkungan, tidak meratanya verifikasi langsung terhadap rumah terdampak, serta belum optimalnya keterbukaan daftar dan kriteria penerima menciptakan ruang bagi masuknya pertimbangan nonformal dalam proses distribusi. Dengan demikian, ketimpangan bantuan dalam penelitian ini bukan terutama disebabkan oleh ketiadaan prosedur, melainkan oleh kesenjangan antara aturan formal dan praktik implementasinya di tingkat lokal.

Penelitian juga menemukan indikasi bahwa kedekatan personal, hubungan kekerabatan, dan jaringan kekuasaan lokal berpengaruh dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Warga yang memiliki hubungan dengan aparat atau elite lokal cenderung memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan proses verifikasi, sedangkan warga terdampak yang tidak memiliki jaringan berada pada posisi yang lebih rentan untuk terlewat dalam pendataan. Dalam konteks ini, nepotisme dapat dipahami sebagai penggunaan relasi personal atau kekerabatan sebagai pertimbangan informal yang menggeser kriteria objektif berupa tingkat kerusakan, kebutuhan, dan kerentanan korban. Dari perspektif stratifikasi sosial Weber, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber daya publik tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh status dan kedekatan dengan struktur kekuasaan. Jaringan sosial yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan peluangnya memperoleh informasi dan akses terhadap bantuan. Sebaliknya, masyarakat miskin yang sekaligus tidak mempunyai jaringan kekuasaan menghadapi bentuk kerentanan berlapis: mereka mengalami dampak bencana sekaligus berisiko tereksklusi dari sumber daya pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan yang tidak transparan dapat menjadi mekanisme yang justru mereproduksi stratifikasi sosial. Implikasi ketimpangan tersebut terlihat pada dua dimensi keadilan. Pada keadilan distributif, ditemukan ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan dan penerimaan bantuan. Pada keadilan prosedural, keterbatasan informasi dan tidak tersedianya mekanisme sanggah yang jelas membuat sebagian warga tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengoreksi data atau mempertanyakan keputusan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa keadilan bantuan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan transparansi proses, konsistensi kriteria, kesetaraan akses informasi, dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh penjelasan serta mengajukan keberatan. Secara sosial, distribusi yang dipersepsikan tidak adil berdampak pada munculnya kecemburuan sosial, kecurigaan antartetangga, pelemahan solidaritas horizontal, dan erosi kepercayaan terhadap pemerintah lokal. Pada kelompok yang secara ekonomi lemah dan tidak mempunyai akses terhadap jaringan kekuasaan, pengalaman tersebut juga berpotensi menghasilkan keterasingan, apatisme, dan perasaan tidak memiliki daya tawar terhadap proses pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan tata kelola bantuan tidak hanya menghasilkan kerugian material, tetapi juga dapat merusak modal sosial yang justru sangat dibutuhkan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana. Karena itu, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nepotisme dalam distribusi bantuan tidak selalu berlangsung secara terbuka pada tahap penyerahan bantuan, tetapi dapat bekerja secara lebih subtil sejak proses pendataan, pengusulan nama, pemberian informasi, dan verifikasi calon penerima. Tata kelola bantuan bencana perlu diarahkan pada sistem yang

lebih transparan dan partisipatif melalui verifikasi data berbasis masyarakat, publikasi daftar sementara penerima, pemberian masa sanggah, penyediaan kanal pengaduan, dan pengawasan independen. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan yang ditemukan dalam penelitian. Mekanisme semacam ini penting bukan untuk menghilangkan peran aparat lokal, melainkan untuk memastikan bahwa pengetahuan lokal mereka dikontrol melalui verifikasi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, bantuan bencana dapat dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan masyarakat yang adil, objektif, transparan, serta berpihak pada tingkat kebutuhan dan kerentanan korban, bukan pada kedekatan dengan jaringan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. J., & Handayani, B. L. (2022). Stratifikasi sosial dan akses atas keselamatan terhadap bencana. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 293–304.
- Agung, Y. R., Yahya, Y., Fu'aturosida, R., Ahda, M., Khotimah, K., & Hidayat, S. (2022). Peran modal sosial sebagai solusi konflik pasca gempa bumi. *Journal of Indonesian Psychological Science*, 2(1), 77–98.
- Ariany, L., Rahman, Y., & Aziza, H. (2023). Pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana berbasis prinsip keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 8(3).
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- de Silva, M. W. A. (2009). Ethnicity, politics and inequality: Post-tsunami humanitarian aid delivery in Ampara District, Sri Lanka. *Disasters*, 33(2), 253–273. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2008.01073.x>
- Eadie, P., & Su, Y. (2018). Post-disaster social capital: Trust, equity, bayanihan and Typhoon Yolanda. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 27(3), 334–345. <https://doi.org/10.1108/DPM-02-2018-0060>
- Nunung, A., Latifah, Fatmawati, & Sulastri, L. (2025). Implementasi kebijakan bantuan sosial untuk menginvestigasi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 62–82.
- Pramono, R. (2016). Perspektif sosiologis dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*.
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal of Social Science Research*.

- Subagyo, A., Afdhal, A., & Derriawan, D. (2023). Metode penelitian kualitatif. *Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tyler, T. R. (1988). What is procedural justice? Criteria used by citizens to assess the fairness of legal procedures. *Law & Society Review*, 22(1), 103–135.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.; T. Parsons, Ed.). Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.